

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos | Media Indonesia | Wawasan |
| Tribun Jateng | Radar Semarang | Republika | Kompas | Kedaulatan Rakyat |

Wilayah: Kabupaten Kudus

Halaman 4 dan 10

Rp3,5 M Dikucurkan untuk Pemuka Agama

KUDUS - Pemkab Kudus melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Kudus, gelontorkan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk memberikan bantuan kepada imam, khatib serta marbot masjid dan musala di Kabupaten Kudus.

Kepala Bagian Kesra Setda Kudus, Mundir mengungkapkan, anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. Selain imam, khatib dan marbot masjid dan musala, untuk nonmuslim juga mendapat bantuan kesejahteraan rakyat tersebut.

"Pemuka agama nonmuslim yang jabatannya seperti imam dan marbot, juga mendapat bantuan serupa," kata Mundir.

Setiap orang, lanjut Mundir, akan mendapat bantuan Rp 1 juta per tahun. Mengingat anggaran tersebut bentuknya hibah, sehingga hanya bisa diberikan sekali setiap tahunnya.

"Bantuannya hanya bisa diberikan sekali, karena bentuknya hibah," jelasnya. ▶ Baca RP 3 M... 10

Bagian Kesra, sambungnya, pada APBD Perubahan 2019 ini juga mengucurkan anggaran untuk Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) melalui program Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) sebesar Rp 2,5 miliar, Badko TPQ Rp 35 miliar.

"Khusus untuk pengajar swasta nonmuslim atau Diakonia sebesar Rp 732 juta," paparnya.

Diakui, sebelumnya anggota DPRD Kudus melalui padangan

fraksi-fraksi ada yang mengkritisi soal data penerima bantuan dari Pemkab Kudus. Menanggapi hal itu, pihaknya mengaku sudah melakukan validasi dengan membuat keputusan bupati tentang pembentukan tim verifikasi dan validasi sebelum menyerahkan bantuan.

Adapun kriteria penerima bantuan, lanjutnya, tidak berstatus PNS, TNI, maupun Polri, serta tidak menerima tunjangan kes-

ejahteraan guru yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus secara ganda. Sedangkan pelaksanaan verifikasi dan validasi penerimanya, juga dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi terkait.

"Verifikasi dan validasi itu juga dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat lembaga, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten," paparnya.

Terpisah, Plt Bupati Kudus H.M

Hartopo mengungkapkan, program kerja pada perubahan anggaran tahun ini, lebih memprioritaskan pada program kerja yang sudah berjalan. Seperti program TKGS dan pemberian tunjangan untuk marbot dan imam masjid atau musala, serta pemuka agama nonmuslim setingkat imam masjid atau musala.

"Di APBD Perubahan ini yang menjadi prioritas adalah program yang sudah berjalan," jelasnya lagi. **(han)**